

**LAPORAN**  
**PERTEMUAN REGULER XII**  
**KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL**  
**(KPDP-TCT) PROVINSI NTB**  
**26 JULI 2018**

**Hari dan tanggal pertemuan :** Kamis, 26 Juli 2018

**Waktu Pertemuan (mulai dan akhir) :** Mulai pukul 09:20, selesai pukul 16:00

Dibuka oleh : Ir. Lalu Hamdi, M.Si

Ditutup oleh : Beny Iskandar

**Lokasi Pertemuan :** Ruang Pertemuan di Hotel Pratama, Mataram, Lombok, NTB

**Peserta (Nama/Institusi) :**

1. Hary Christyanto (Dit PSDI-KKP)
2. Enang R (Dit PSDI-KKP)
3. Ir. Lalu Hamdi, M.Si. (DKP Provinsi NTB)
4. Beny Iskandar (DKP Provinsi NTB)
5. Abdul Wahab (DKP Provinsi NTB)
6. Suhardin (DKP Kab. Bima)
7. Sabri (DKP Kab. Lombok Timur)
8. Ida Rupaida (DKP Kab. Sumbawa)
9. Amiril Mukminin (Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok)
10. Herman E. (Syahbandar Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok)
11. Sahdim Mulyadi (Satker PSDKP Labuhan Lombok)
12. Amirudin (Syahbandar KSOP Lembar)
13. L. Satria Wibawa (UPP Labuhan Lombok)
14. Nurjamil (HNSI NTB)
15. Askar (UD. Baura)
16. H. Catir (UD. Erpa Utama)
17. Pendi Riadi (UD. Rizki Bersama)
18. Burhanuddin (UD. Usaha Mina)
19. Sukriadi (Nelayan)
20. Fadlin (Nelayan)
21. Riki Sugianto (Nelayan)
22. Sukma (WCS)
23. Saut T. (MDPI)
24. Wildan (MDPI)
25. A. Riza Baroqi (MDPI)
26. Hairul Hadi (MDPI)
27. Juh rin (MDPI)
28. Santri Dinalhusna (MDPI)

## I. PENDAHULUAN

Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (KPDP-TCT) merupakan pertemuan reguler yang di dukung oleh MDPI dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 107/KEPMEN-KP/2015. Pertemuan Komite ini bertujuan menjadi wadah diskusi seluruh stakeholder Perikanan TCT untuk berkolaborasi dalam berbagi informasi dan mencari solusi terkait isu Perikanan TCT di NTB. Keterlibatan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan sebagai masukan untuk membangun Perikanan TCT di NTB.

Pertemuan reguler XII KPDP-TCT provinsi NTB menindaklanjuti pertemuan XI, pada tanggal 21 Desember 2017 yang lalu. Peserta yang hadir meliputi stakeholder Perikanan, baik pemerintah pusat, daerah, pengusaha, nelayan, dan juga kesyahbandaran. Beberapa hal yang dibahas, yaitu perkembangan hasil pendataan Perikanan TCT di Labuhan Lombok, berbagi informasi terkait Harvest Strategy (PSDI-KKP), *Basic Safety Training* (BST) untuk nelayan dari KSOP Lembar, serta rekomendasi terkait rencana kerja komite dalam mendukung pengelolaan Perikanan TCT di NTB.

## II. HASIL DISKUSI

### A. Lalu Hamdi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Pada saat pembukaan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
  - ✓ Ruang laut untuk Kawasan pemanfaatan umum (80%) termasuk wilayah penangkapan ikan.
  - ✓ Kawasan konservasi (12%) atau seluas 341.000 Ha.
  - ✓ Kawasan alur laut terdiri dari pipa kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi ikan khususnya ETP spesies.
  - ✓ Kawasan strategis nasional tertentu (berada pada perbatasan dengan negara lain dan pulau terluar) seluas 89.000 Ha.
- DKP bekerjasama dengan WCS dalam rangka pengelolaan ikan kakap dan kerapu di Teluk Saleh, Teluk Sepi, dan Waworada
- Dari 10 jenis yang diteliti dari ikan-ikan tersebut, ada 3 jenis yang sudah over dari batas lestari. Dengan kondisi seperti ini, DKP bersepakat dengan supplier dan nelayan membuat rencana aksi terkait alat tangkap dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, perlu diatur.
- Untuk ukuran ikan yang boleh ditangkap yaitu berukuran 500 gram (pernah bertelur), dibawah ukuran tersebut, pembeli tidak akan membeli ikan itu, atau membeli dengan harga yang murah. Sehingga nelayan dan supplier dapat memahami konsep pengelolaan.
- Data merupakan dasar untuk melakukan dan memutuskan suatu kebijakan. Oleh karena itu, kepada perusahaan dan nelayan, diharapkan bantuannya untuk ketersediaan data.
- Diharapkan dari data yang diperoleh oleh MDPI, dapat memberikan rekomendasi terkait pengelolaan TCT

## **B. Beny Iskandar, Kabid Perikanan Tangkap DKP Provinsi NTB**

Meyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Januari-Juni 2018 dengan pencapaian sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan KPDP telah ditandatangani oleh Kadis DKP Provinsi NTB.
- Penyusunan draft MoU masih dalam proses
- Belum terlaksana
- Sudah dilaksanakan kepada beberapa nelayan di labuhan Lombok saat pengajuan pendaftaran ulang kapal
- Assesment sudah dilakukan untuk usaha pendataan, namun saat ini masih melihat ketersediaan anggaran
- Sosialisasi pengisian logbook sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari syahbandar kepada nelayan
- Verifikasi data IFISH belum dapat dilakukan karena waktu dan kesempatan masih terbatas.

Beberapa kegiatan Tambahan yaitu mendukung pendaftaran pengukuran ulang kapal sudah dilakukan di beberapa tempat ;

- Labuhan Lombok : 180 Kapal
- Awang 32 kapal, dalam tahap melengkapi persyaratan.
- P. Marangkik, 29 kapal sudah di ukur dan tahap verifikasi dokumen & menunggu konfirmasi pemilik untuk di terbitkan.
- Sumbawa sekitar 10 kapal.

Pemasangan alat monitoring kapal (Kamera dan Tracker di beberapa kapal, Timelaps camera dan spot trace) yang berfungsi untuk memonitor aktifitas nelayan dan mengetahui lokasi nelayan memancing.

## **C. Harry Christianto (PSDI)**

Menjelaskan tentang *Harvest Strategy* dengan fokus sebagai berikut :

- *Harvest Strategy* merupakan strategi pemanenan tuna terkini yang telah diadopsi oleh RFMO.
- Hasil penelitian migrasi tuna melalui *tagging* sebagai bukti ilmiah bahwa tuna bermigrasi keluar dan masuk ke WPPNRI.
- Perikanan berkelanjutan.
- Strategi pemanfaatan (panen) TCT di WPPNRI 713,714 dan 715 (perairan kepulauan Indonesia), yang disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan Internasional (RFMO) dan nasional.
- *Element harvest strategy* mencakup tujuan pengelolaan, titik acuan batas, *Harvest Control Rules*, MSE dan monitoring strategy.

Rencana aksi dalam pelaksanaan *harvest strategy* tahun 2018-2023, seperti mobilisasi observer on-board, pengisian data logbook oleh nakhoda, pengelolaan data misalnya untuk menentukan CPUE dan kondisi stok, platform koordinasi data, data riset, legislasi, pengembangan kapasitas, konsultasi dengan stakeholder, sertifikasi (MSC dan FT) serta survey sosial-ekonomi.

#### **D. Amiruddin dari KSOP Lembar**

menyampaikan hal sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan Badan Diklat Kemenhub merencanakan pelaksanaan kursus gratis (diluar transportasi dan penginapan) khusus untuk nelayan (BST) dan SKK 60 mil. Persyaratan minimal ijazah Sekolah Dasar, atau surat keterangan tempat sekolah dan sudah lulus, surat keterangan sehat, akte kelahiran, KTP atau Surat Keterangan domisili tetapi sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Tidak Mampu.
- Yang sudah terdaftar sekitar 67 orang sampai hari ini, sedangkan target peserta sampai 2000 orang.
- Pendaftaran nya di KSOP Lembar mulai 5 Juli – 27 Agustus 2018.
- Pelaksanaan kursus mulai tanggal 30 Agustus – 5 September 2018.
- Kelemahan pelaksanaan penerbitan pas kapal ikan umumnya terbengkalai karena surat tukang yang tidak tersedia.

Terkait draft Persetujuan Kerjasama (PKS) pendaftaran kapal DKP Prov. NTB diharapkan DKP Provinsi NTB dapat menyampaikan draft PKS tersebut untuk dapat dibahas secara bersama.

#### **E. Nurjamil (HNSI)**

Menyampaikan tentang tentang riwayat pembentukan KPDP, yaitu dari project IMACS dan CSR Anova, yang sangat sayang jika tidak dilanjutkan, sehingga MDPI melanjutkan pendataan tersebut. Pak Nurjamil juga bercerita terkait lokasi pendaratan ikan tuna di Provinsi NTB seperti Labuhan Lombok, Bima, Teluk Awang. Disampaikan juga harapan agar Pemda Prov. NTB dapat mengambil alih kegiatan MDPI ke depan.

#### **F. Juhrin (MDPI)**

Mempresentasikan perkembangan pendataan TCT di Labuhan Lombok periode Januari – Juni 2018:

- Hasil Analisa pengumpulan data tangkapan *Handline* di Labuhan Lombok meliputi komposisi jenis hasil tangkapan (YF 77%; SKJ 22 % dan BET 1%), length frequency (didominasi berukuran dibawah Lm), fishing ground dengan grid 1 derajat (60x60 mil laut), rata-rata hasil tangkapan per-bulan dimana April sebagai musim puncak, penggunaan umpan per-trip/bulan (dominan jenis umpan adalah baby tuna/cakalang/tongkol/layang), tangkapan lainnya (mahi-mahi atau lemadang, fregate tuna /tongkol krai, kawa-kawa, lisong, black marlin/marlin tipis).
- Sekitar 180 kapal penangkap ikan telah difasilitasi untuk pengukuran ulang dan 32 kapal di Teluk Awang (dalam proses melengkapi berkas seperti surat keterangan tukang), Pulau Maringkik difasilitasi 29 kapal (sedang proses melengkapi berkas).

#### **G. Amiril Mukmin (Kepala PPP Labuhan Lombok)**

Meyampaikan peran penting MDPI dalam pengurusan perizinan kapal meliputi Pendaftaran di KSOP dan BPKP di DKP. Diharapkan agar peran ini dapat terus didukung dan dilanjutkan.

## **H. Wildan (MDPI)**

Mensosialisasikan penggunaan IFish database sebagai berikut:

- NTB adalah pilot project (percontohan) pelaksanaan IFish database.
- Pengguna adalah user (bisa buka tapi tak bisa edit), pemerintah (bisa buka tetapi tidak bisa edit); Supplier (bisa buka data kapalnya, tetapi tidak bisa buka data kapal lain), Admin (Bisa buka dan edit).
- Selanjutnya dilakukan demonstrasi akses IFish database.
- Berbagai informasi seperti komposisi tangkapan jenis tuna, tangkapan sampingan, lokasi tangkapan, penggunaan umpan dan banyak informasi lainnya dapat diakses di IFISH database
- Permohonan data untuk kepentingan tertentu, dapat dilakukan dengan memohon kepada ketua KPDP TCT Provinsi NTB untuk mendapatkan persetujuan, dan data akan disediakan oleh MDPI.

### III. RENCANA AKSI JULI – DESEMBER 2018

Adapun sesi terakhir dari pertemuan ini yaitu mendiskusikan rencana aksi untuk 6 bulan kedepan yang di pimpin oleh Pak Saut. Adapun hasil diskusi tersebut dapat dilihat dari rencana aksi dibawah ini :

No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	PIC	Dana	Waktu
1	Pengumpulan data hasil tangkapan di lokasi terpilih, untuk kepentingan IFish dan <i>Harvest Strategy</i> dalam mendukung perolehan sertifikasi <i>MSC</i> .	Laporan analisa hasil pengumpulan data.	MDPI, PPP Labuhan Lombok dan Supplier, Nelayan	MDPI	Jul-Dec 2018
2	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan MDPI kepada DKP Provinsi NTB dan Kab. Lotim secara berkala setiap 3 bulan.	Laporan berkala dari MDPI kepada Kepala Dinas DKP Provinsi NTB	MDPI	MDPI	Mulai akhir July, September dan Desember 2018
3	Penyelesaian PKS pendaftaran kapal berukuran dibawah 30 GT antara KSOP Lembar, KUPP Lombok Timur dan DKP Provinsi NTB	PKS yang ditandatangani KSOP, KUPP Lotim dan DKP Provinsi NTB	DKP Provinsi dan Kab/Kota, HNSI, MDPI, KSOP, KUPP Lotim	MDPI, DKP Provinsi NTB,	September 2018
4	Inventarisasi dan identifikasi rumpon (nama pemilik, lokasi rumpon, jumlah rumpon, layout, jenis alat tangkap yang digunakan)	Tersedianya data distribusi rumpon yang telah terpasang.	DKP Provinsi, DKP Kab/Kota, Supplier, Pelabuhan Perikanan, Nelayan,	DKP Provinsi, MDPI, Supplier	November 2018
5	Sosialisasi dan simulasi pengisian logbook.		Syahbandar PPP Labuhan Lombok,	MDPI, PSDI, DKP Provinsi	November 2018
6	Inventarisasi nelayan yang akan diusulkan mengikuti pelatihan BST dan SKK 60 mil di KSOP Lembar.	Tersedianya daftar nelayan yang memenuhi persyaratan dan bersedia mengikuti pelatihan BST dan SKK 60 mil.	MDPI, DKP Provinsi NTB dan DKP Kab/Kota se-NTB, Supplier ikan	MDPI (Kab.Lotim) dan DKP Provinsi, Supplier ikan	5 Juli - 27 Agustus 2018. <b>Pelaksanaan diklat tanggal 31 Agustus – 5 September 2018</b>

\*Disusun Oleh : 1. Saut Tampubolon (MDPI), 2. A. Riza Baroqi (MDPI)

**\*DOKUMENTASI**

